



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI RABU, 29 APRIL 2026

RINGKASAN BERITA HARI INI

Ketua H. Abdillah Naah Wakil Ketua Suyarno, S.H., M.H. Wakil Ketua H. Kayan, S.H. Wakil Ketua Warih Andono, S.E.

Proyek RSUD Sedati Dilanjutkan Lagi Juni

SIDOARJO - Setelah mendapat sorotan dari legislator, Pemkab Sidoarjo akhirnya melanjutkan pembangunan RSUD Sedati. Proyek pembangunan fasilitas kesehatan itu masuk kelang. Targetnya, konstruksi sudah dimulai akhir Juni.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo dr Laksmi Herawat Yuanitina mengatakan bahwa proses berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Dinkes fokus pada pemilihan penyedia. Dalam tahap ini, peserta tender mulai menyiapkan dan menyampaikan dokumen penawaran.

"Untuk alokasi sekitar Rp47,5 miliar," ujar Laksmi. Menurut dia, dana tersebut digunakan untuk melanjutkan pembangunan fisik rumah sakit yang sempat mangkrak beberapa bulan. Pekerjaan mencakup struktur hingga instalasi penunjang.



SEMPAT MANDEK: Proyek pembangunan RSUD Sedati dianggarkan Rp 47,5 miliar dan ditargetkan selesai tahun depan.

Lahan Masih Perlu Penataan

Pembangunan RSUD Sedati sebenarnya masuk proyek strategis 2025. Namun penataan sebelum pembangunan terhenti karena pengerjaan molor. Dari pengamatan, sebagian struktur utama bangunan sudah terbangun. Di antaranya kolom, balok, dan pelat lantai beton di beberapa bagian. Namun, pekerjaan tersebut belum tuntas dan masih memerlukan penyempurnaan.

Kondisi lahan masih memerlukan penataan sebelum konstruksi dilanjutkan. Beberapa area masih terdapat material sisa dan perlupematangan. "Lahannya masih perlu penataan termasuk membersihkan material sisa dan penanganan genangan air," kata Laksmi. (ful/hen)



BERI SANKSI: Kanit Turjawala Sat Lantas Polresta Sidoarjo AKP Al Mubarak (kanan) menyerahkan bukti tilang kepada pengendara.

Sehari, ETLE Handheld Jaring 200 Pelanggar Lalu Lintas

SIDOARJO - Polresta Sidoarjo mulai menerapkan sistem **ETLE Handheld** untuk menindak pelanggaran lalu lintas. Seperti peragaan Kaharjari Niwona satu jalan Jati Raya, Jalan Raya Lebda dan Jalan Raya Saritomo. Pemilihan lokasi menyesuaikan tingginya pelanggaran di daerah tersebut.

Menurut Yudi, pelanggaran yang terakumulasi ETLE handheld masih sedikit. Sebagai besar tak memakai helm saat berkendara. Pengunaan ETLE handheld memungkinkan petugas melakukan penindakan secara mobile dengan dukungan kamera terintegrasi yang merekam pelanggaran secara langsung di lapangan. "Seti pelanggar terakumulasi secara elektronik sehingga lebih transparan dan akuntabel," kata Yudi.

Dia berharap, optimalisasi ETLE handheld dapat menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. "Nantinya kita tidak melulu spot khusus. Petugas berkeliling, utamanya di wilayah rawan lalu lintas yang ditambah Yudi. (eja/hen)



AMBIL FOTO WAJAH: Salah satu narapidana mengikuti proses perekaman di Lapas Kelas I Surabaya, Senin (27/4).

69 Napi Jalani Perekaman KTP di Lapas Surabaya

SIDOARJO - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Surabaya bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk) Kabupaten Sidoarjo membuka layanan administrasi kependudukan untuk memfasilitasi penghuni lapas. Kegiatan yang digelar bertepatan dengan Hari Kemerdekaan RI ke-74.

Hingga kini, sudah ada 69 narapidana yang mengikuti perekaman KTP. Pih Kepala Lapas Kelas I Surabaya Bambang Sugianto mengatakan, proses perekaman tersebut merupakan upaya pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi narapidana. "Kami berkomitmen memastikan setiap narapidana tetap mendapatkan hak kependudukan yang valid. Proses yang dilakukan meliputi verifikasi NIK, perekaman biometrik seperti sidik jari dan foto wajah, serta pemadanan data secara langsung dengan sistem Dukcapil.

Bambang mengungkapkan, validitas data kependudukan menjadi syarat penting untuk mengakses berbagai layanan publik, termasuk jaminan kesehatan. "Jika nanti narapidana sudah bisa berpas-pas KTP," paparnya.

Kepala Disdukcapil Sidoarjo Redi Kusuma mengatakan bahwa pihaknya juga menyalurkan Lapis Kelas II Sidoarjo untuk perekaman dan verifikasi data warga binaan. Di lapas tersebut, ada 24 warga binaan yang akan mengikuti proses perekaman. (ful/hen)

DIDUGA CEROBO P2CKTR SIDOARJO KECELOKAN IZIN PBG PERUMAHAN GREEN PALM SEPANDE, KADIS PERKIM BUNGKAM OKNUM DPRD SIDOARJO TAK MEMBAJAH

Sidoarjo, Pajuk Kiru. Seperti Pembinaan sebelumnya di kawasan perumahan Green Palm Sepande di Kecamatan Gading, Sidoarjo, menandai babak baru yang semakin ketat. Akibatnya pembongkaran pembuatnya Soela 27/04/2026 lalu. Setelah sekitar 100 meter di bagian ini ketertarikan figur menyayangi ke Kabid P. Padali, kawasan industri kawasan Pajuk Kiru.

Menyayangi ke Kabid P. Padali, kawasan industri kawasan Pajuk Kiru.

ETLE Handheld Jaring 473 Pelanggaran Lalin

Satu Lalin Lintas Polresta Sidoarjo menindak ratusan pelanggar melalui sistem **ETLE Handheld**. Penindakan dilakukan secara mobile di sejumlah titik rawan pelanggaran dan kecelakaan di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Suryanto, Instruktur Rute Satlap



Polresta Sidoarjo menindak pelanggar lalu lintas menggunakan sistem ETLE Handheld

Komisi C Minta Pembangunan Frontage Road Dikebut Lagi

KOTA - Target ambisius mencapai 10 meter menapal terendah dalam tahun terakhir. Hal ini ditentang mendiri dari Komisi C DPRD Sidoarjo.

Target ambisius mencapai 10 meter menapal terendah dalam tahun terakhir. Hal ini ditentang mendiri dari Komisi C DPRD Sidoarjo.

Masa Tunggu Haji di Sidoarjo Capai 29 Tahun

Jumlah Antrian Berbanyak Se-jalini. Sidarjo - Masa tunggu haji ke Tanah Suci mencapai 29 tahun. Hal ini ditentang mendiri dari Komisi C DPRD Sidoarjo.

Masa tunggu haji ke Tanah Suci mencapai 29 tahun. Hal ini ditentang mendiri dari Komisi C DPRD Sidoarjo.

Tarif Parkir Progresif Disorot Bermotif Bisnis, RSUD RT Notopuro Berikan Klarifikasi

28 April 2026 11:51 WIB
oleh redaksi

Perwakilan DPRD Sidoarjo mengkritik kebijakan tarif parkir progresif di RSUD RT Notopuro. Mereka menilai kebijakan ini bertentangan dengan semangat pelayanan kesehatan yang harus diutamakan.

Salah satu perwakilan DPRD Sidoarjo menyatakan, "Kebijakan tarif parkir progresif ini dinilai sebagai upaya memaksimalkan pendapatan yang akan digunakan untuk kepentingan bisnis, bukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan." Dia berharap pemerintah setempat dapat segera melakukan klarifikasi dan peninjauan kembali kebijakan tersebut.

Verifikasi Ulang, Pemkab Temukan 700 RT Belum Penuhi Syarat 30 KK

SIDOARJO - Pemkab Sidoarjo tengah memverifikasi ulang pengurus rukun tetangga (RT). Hasilnya, ada 700 RT yang masih belum memenuhi syarat minimal 30 kepala keluarga (KK) sesuai ketentuan. Temuan tersebut menjadi dasar penerbitan data sekaligus evaluasi penyaluran insentif pengurus.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sidoarjo Probo Agus Sunarno mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan verifikasi ulang terhadap struktur RT sesuai peraturan bupati. "Yang tidak sesuai aturan kami beneri. Prinsipnya harus taat regulasi," katanya.

Saat awal pendataan ulang dinas PMD menemukan sekitar 700 RT yang tidak sesuai aturan. Setelah pembandian dan pendampingan, kini jumlah tersebut menyusut menjadi 55 RT.

Probo tak menampik, memang masih ada Ketua RT yang belum menemrkan haknya karena masih menunggu validasi. Pencairan akan diberikan saat syarat administratif sudah terpenuhi. Bahkan, pembayaran akan dilakukan secara rata-rata untuk periode Januari hingga April 2026. (ful/hen)

Hambatan Pencairan Insentif Pengurus

SIDOARJO - Pemkab Sidoarjo tengah memverifikasi ulang pengurus rukun tetangga (RT). Hasilnya, ada 700 RT yang masih belum memenuhi syarat minimal 30 kepala keluarga (KK) sesuai ketentuan. Temuan tersebut menjadi dasar penerbitan data sekaligus evaluasi penyaluran insentif pengurus.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sidoarjo Probo Agus Sunarno mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan verifikasi ulang terhadap struktur RT sesuai peraturan bupati. "Yang tidak sesuai aturan kami beneri. Prinsipnya harus taat regulasi," katanya.

Saat awal pendataan ulang dinas PMD menemukan sekitar 700 RT yang tidak sesuai aturan. Setelah pembandian dan pendampingan, kini jumlah tersebut menyusut menjadi 55 RT.

Probo tak menampik, memang masih ada Ketua RT yang belum menemrkan haknya karena masih menunggu validasi. Pencairan akan diberikan saat syarat administratif sudah terpenuhi. Bahkan, pembayaran akan dilakukan secara rata-rata untuk periode Januari hingga April 2026. (ful/hen)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



SATLANTAS POLRESTA SIDOARJO

BERI SANKSI: Kanit Turjawali Satlantas Polresta Sidoarjo AKP Ali Mubarak (kanan) menyerahkan bukti tilang kepada pelanggar.

Sehari, ETL E Handheld Jaring 200 Pelanggar Lalu Lintas

SIDOARJO - Polresta Sidoarjo mulai menerapkan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Handheld* Senin (27/4). Melalui sistem berbasis ponsel tersebut, petugas berhasil menindak 200 pelanggar dalam sehari.

Kasatlantas Polresta Sidoarjo AKP Yudhi Anugrah Putra mengatakan, ETL handheld menjadi alat baru yang membantu petugas untuk memantau ketertiban dan kelancaran lalu lintas. "Ke depan, kami maksimalkan untuk menertibkan pelanggar," katanya kemarin (28/4).

Pemantauan pelanggaran dengan ETL handheld disebar ke sejumlah titik. Seperti pertigaan Kahuripan Nirwana atau Jalan Jati Raya, Jalan Raya Lebo, dan Jalan Raya Sarirogo. Pemilihan lokasi menyesuaikan tingginya pelanggaran di daerah tersebut.

Menurut Yudhi, pelanggar yang terekam ETL handheld masih didominasi pengendara roda dua. Sebagian besar tak memakai helm saat berkendara. Penggunaan ETL handheld memungkinkan petugas melakukan pe-

nindakan secara mobile dengan dukungan kamera terintegrasi yang merekam pelanggaran secara langsung di lapangan. "Setiap pelanggaran terekam secara elektronik sehingga lebih transparan dan akuntabel," katanya.

Dia berharap, optimalisasi ETL handheld dapat menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. "Nantinya kita tidak memiliki spot khusus. Petugas bisa berkeliling, utamanya di wilayah yang rawan laka lintas juga," tambah Yudhi. (eza/hen)

Jawa Pos

Masa Tunggu Haji di Sidoarjo Capai 29 Tahun

Jumlah Antrean Terbanyak Se-Jatim

SIDOARJO - Minat masyarakat Kota Delta untuk naik haji cukup tinggi. Daftar tunggu jemaah haji telah mencapai 84.996 orang per 25 April. Angka itu menjadi yang terbesar se-Jatim untuk saat ini.

Tingginya CJH yang masuk antrean berdampak pada semakin lamanya masa tunggu. Dengan kuota tetap, pendaftar haji tahun ini harus menunggu hingga 29 tahun untuk berangkat.

Plt Kepala Kemenhaj Sidoarjo Eliana mengatakan bahwa secara nasional jumlah antrean haji memang cukup tinggi. Itu bisa dilihat di SISKOHAT. "Saat ini daftar tunggu masih 84.996 orang," katanya kemarin (28/4).

Secara nasional, kata Eliana, rata-rata masa tunggu haji saat ini sekitar 26 tahun. Sedangkan untuk pendaftaran terbaru, estimasinya sudah mencapai 29 tahun karena jumlah pendaftar terus meningkat sementara kuota relatif tetap.

Usulkan Pembangunan Pusat Informasi Haji

Meski begitu, Eliana menyebutkan bahwa masa tunggu tersebut bisa berubah. Itu

bergantung pada sejumlah hal. "Itu bisa bertambah atau berkurang. Jumlahnya bisa berkurang jika ada yang membatalkan," katanya.

Perubahan masa tunggu juga bisa terjadi karena kebijakan pemerintah yang memprioritaskan lansia. Penentuan dilakukan berdasarkan usia tertua serta lamanya masa tunggu di masing-masing daerah. Dan saat ini, lansia termuda di Jatim berada pada kisaran usia 84 hingga 85 tahun.

Dengan banyaknya warga yang antre, Eliana mengusulkan terkait pentingnya Hajj Command Center. Itu tidak hanya berfungsi sebagai pusat pelayanan ibadah haji. Namun pusat informasi untuk transparansi data pendaftar. Sehingga masyarakat bisa memperkirakan kapan bisa berangkat ke Tanah Suci. (eza/hen)



PERKEMBANGAN IBADAH HAJI

Ada **2.700** jemaah berangkat tahun ini

Jumlah antrean **84.996** orang

Masa tunggu hingga **29** tahun

Pendaftar haji tersebar secara merata di **18** kecamatan

Sumber: Berbagai Informasi



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



AMBIL FOTO WAJAH: Salah satu narapidana mengikuti proses perekaman di Lapas Kelas I Surabaya, Senin (27/4).

69 Napi Jalani Perekaman KTP di Lapas Surabaya

SIDOARJO - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Surabaya bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk) Kabupaten Sidoarjo membuka layanan administrasi kependudukan untuk memfasilitasi penghuni lapas. Kegiatan yang digelar bertahap itu dimulai Senin (27/4). Hingga kini, sudah ada 69 narapidana yang mengikuti verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan perekaman KTP.

Plh Kepala Lapas Kelas I Surabaya Bambang Sugianto mengatakan, proses perekaman tersebut merupakan upaya pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi narapidana. "Kami berkomitmen memastikan setiap narapidana tetap mendapatkan hak administrasi kependudukan secara utuh," katanya kemarin (28/4).

Perekaman menyoar ke

warga binaan yang belum memiliki data kependudukan valid. Proses yang dilakukan meliputi verifikasi NIK, perekaman biometrik seperti sidik jari dan foto wajah, serta pepadanan data secara langsung dengan sistem Dukcapil.

Bambang mengungkapkan, validitas data kependudukan menjadi syarat penting untuk mengakses berbagai layanan publik, termasuk jaminan kesehatan. "Jika nanti narapidana sudah bisa bebas pasti butuh KTP," paparnya.

Kepala Disdukcapil Sidoarjo Redi Kusuma mengatakan bahwa pihaknya juga menyoar Lapas Kelas IIA Sidoarjo untuk perekaman dan verifikasi data warga binaan. Di lapas tersebut, ada 24 warga binaan yang mengikuti program. "Ini kolaborasi untuk memenuhi hak-hak warga binaan," imbuhnya. (eza/hen)

Jawa Pos

Proyek RSUD Sedati Dilanjutkan Lagi Juni

SIDOARJO – Setelah mendapat sorotan dari legislator, Pemkab Sidoarjo akhirnya melanjutkan pembangunan RSUD Sedati. Proyek pembangunan fasilitas kesehatan itu masuk lelang. Targetnya, konstruksi sudah dimulai akhir Juni.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo dr Lakhsmie Herawati Yuantina mengatakan bahwa proses berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dinkes fokus pada pemilihan penyedia. Dalam tahap ini, peserta tender mulai menyiapkan dan menyampaikan dokumen penawaran.

"Untuk alokasi sekitar Rp 47,5 miliar," ujar Lakhsmie. Menurut dia, dana tersebut digunakan untuk melanjutkan pembangunan fisik rumah sakit yang sempat mangkrak beberapa bulan. Pekerjaan mencakup struktur hingga instalasi penunjang.



ANGGER BONDAN/JAWA POS

SEMPAT MANDEK: Proyek pembangunan RSUD Sedati dianggarkan Rp 47,5 miliar dan ditargetkan selesai tahun depan.

Lahan Masih Perlu Penataan

Pembangunan RSUD Sedati sebenarnya masuk proyek strategis 2025. Namun pembangunan terhenti karena kontraktor diputus karena pengerjaan molor. Dari pengamatan, sebagian struktur utama bangunan sudah terbangun. Di antaranya kolom, balok, dan pelat lantai beton di beberapa bagian. Namun, pe-

kerjaan tersebut belum tuntas dan masih memerlukan penyempurnaan.

Kondisi lahan masih memerlukan penataan sebelum konstruksi dilanjutkan. Beberapa area masih terdapat material sisa dan perlu pematangan. "Lahannya masih perlu penataan, termasuk pembersihan material sisa dan penanganan genangan air," kata Lakhsmie. (ful/hen)

Jawa Pos

Verifikasi Ulang, Pemkab Temukan 700 RT Belum Penuhi Syarat 30 KK

Hambat Pencairan Insentif Pengurus

SIDOARJO – Pemkab Sidoarjo tengah memverifikasi ulang pengurus rukun tetangga (RT). Hasilnya, ada 700 RT yang masih belum memenuhi syarat minimal 30 kepala keluarga (KK) sesuai ketentuan. Temuan tersebut menjadi dasar penerbitan data sekaligus evaluasi penyaluran insentif pengurus.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sidoarjo Probo Agus Sunarno mengatakan bah-



“Yang tidak sesuai aturan kami benahi. Prinsipnya harus taat regulasi.”

Probo Agus Sunarno
Kepala Dinas PMD Sidoarjo

wa verifikasi dilakukan untuk memastikan struktur RT sesuai peraturan bupati. “Yang tidak sesuai aturan kami benahi. Prinsipnya

harus taat regulasi,” katanya.

Saat awal pendataan ulang, dinas PMD menemukan sekitar 700 RT yang tidak sesuai aturan. Setelah pembenahan dan pendampingan, kini jumlah tersebut menyusut menjadi 55 RT.

Probo tak menampik, memang masih ada ketua RT yang belum menerima haknya karena masih menunggu validasi. Pencairan akan diberikan saat syarat administratif sudah terpenuhi. Bahkan, pembayaran akan dilakukan secara rapel untuk periode Januari hingga April 2026. (ful/hen)

Jawa Pos

DIDUGA CEROBO P2CKTR SIDOARJO KECOLONG, PALM SEPANDE, KADIS PERKIM BUNGKAM OKNUM

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Seperti Pemberitaan sebelumnya dugaan pelanggaran izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada proyek Perumahan Green Palm Sepande di Kecamatan Candi, Sidoarjo, memasuki babak baru yang semakin keruh. Alih-alih membenarkan klarifikasi transparan, dalam pemberitaan Senin 27/04/2026 otoritas terkait justru memilih “jurus tutup mulut” di tengah isu keterlibatan figur kuat di kursi legislatif.

Kepala Dinas Perkim CKTR Pilih Bungkam

Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media Pojok Kiri kepada Kepala Dinas Perumahan, Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim CKTR) Sidoarjo, Mochamad Bachruni Aryawan**, menemui jalan buntu. Melalui orang Kepercayaan Bachruni disarankan



menanyakan ke Kabid Permukiman dan Perumahan ini terkesan dengan adanya dugaan temuan pelanggaran izin bangunan pejabat terkait saling lempar tanggung jawab saat dikonfirmasi mengenai status legalitas proyek milik PT Dwi Karya Mega tersebut, Bachruni enggan memberikan pernyataan resmi.

Sikap bungkam orang nomor satu di Dinas Perkim CKTR ini memicu tanda tanya besar di tengah publik.

Padahal, kepastian mengenai sudah atau belumnya PBG diterbitkan adalah kunci utama untuk meredam spekulasi mengenai adanya “main mata” dalam proyek yang berisiko tinggi tersebut.

Oknum Anggota DPRD Sidoarjo yang pernah disebut pada pemberitaan sebelumnya

Di sisi lain, rumor kepemilikan proyek oleh oknum anggota DPRD Sidoarjo berinisial BS kian menguat. Saat dikonfirmasi oleh

wartawan Pojok man Kantor Penai keterkaitan Perumahan (Sepande, politikusnya pengaw ini *malah mer

Meski tidak penjelasan dete sejauh mana lnya, sikap “dial mengonfirmasi ya konflik kepe ini pun kian r kritik dari bert

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



MASIH BUNTU: Pembangunan frontage road di Jalan Raya Waru, Sidoarjo.

Komisi C Minta Pembangunan Frontage Road Dikebut Lagi

KOTA-Target ambisius pembangunan frontage road (FR) di Sidoarjo pada 2025 justru berujung pada capaian yang memprihatinkan. Dari rencana sepanjang 700 meter, realisasi di lapangan hanya

mencapai 10 meter menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir.

Kondisi ini langsung menuai sorotan dari Komisi C DPRD Sidoarjo. Ketua Komisi C, Choirul Hidayat, menilai capaian tersebut

tidak hanya jauh dari target, tetapi juga mengindikasikan adanya persoalan serius dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek.

"Jika melihat tren sebelumnya, capaian bisa men-

capai ribuan meter per tahun. Namun pada 2025 hanya 10 meter. Ini jelas ada yang tidak berjalan sebagaimana mestinya," tegas politisi yang akrab disapa Dayat itu.

● Ke Halaman 10



Komisi C Minta...

Menurutnya, capaian tersebut tidak bisa dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat, khususnya dalam mengurangi kemacetan di kawasan padat kendaraan.

Politisi senior dari PDI Perjuangan itu mendesak Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air

(DPUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo segera melakukan evaluasi menyeluruh.

Evaluasi tersebut, lanjutnya, harus mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan di lapangan.

"Masalahnya harus dibuka secara terang. Apakah terkendala pembebasan lahan, perencanaan yang kurang matang, atau faktor teknis lainnya. Jangan sampai target hanya menjadi

angka di atas kertas," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dari pihak terkait agar publik mengetahui kendala utama yang menyebabkan target pembangunan gagal tercapai. Dayat mengingatkan bahwa frontage road memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran arus lalu lintas di Sidoarjo.

Jika progres pembangunan terus melambat, potensi kemacetan akan semakin sulit diatasi. "Frontage road ini merupakan solusi untuk mengurangi kemacetan. Jika progresnya seperti ini, tentu masyarakat yang dirugikan," tandasnya.

Komisi C DPRD Sidoarjo, lanjut dia, akan memperketat pengawasan terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar lebih optimal, baik untuk program yang sedang berjalan maupun perencanaan ke depan.

"Ke depan, target harus lebih realistis namun tetap terukur. Jangan sampai target tinggi, tetapi realisasinya jauh dari harapan," pungkasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPD) Bupati Sidoarjo tahun anggaran 2025, total pembangunan frontage road sejak 2021 hingga 2025 mencapai 7.778,9 meter.

Rinciannya, pada 2021 sepanjang 1.290 meter, meningkat pada 2022 menjadi 3.003,9 meter, kemudian turun pada 2023 menjadi 1.093 meter, dan kembali naik pada 2024 sepanjang 2.391 meter. Namun, capaian tahun 2025 menjadi yang paling rendah sepanjang periode tersebut. **(dik/vga)**

ETLE Handheld Jaring...

ETLE Handheld merupakan inovasi penegakan hukum berbasis teknologi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Sistem ini memungkinkan setiap pelanggaran terekam secara elektronik...

malkan interaksi langsung antara petugas dan pelanggar.

"Penindakan ini juga sebagai upaya edukasi untuk membangun budaya tertib berlalu lintas secara berkelanjutan. Kami berharap masyarakat semakin...

Ia menambahkan, Satlantas Polresta Sidoarjo akan terus mengoptimalkan penegakan hukum berbasis teknologi guna menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

"Langkah ini...

Sementara itu, salah satu pelanggar, Budi Santoso, 35, mengaku menerima sanksi yang diberikan dan berjanji akan lebih tertib saat berkendara.

"Saya mensuk...





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



ETLE Handheld Jaring 473 Pelanggaran Lalin

Satuan Lalu Lintas Polresta Sidoarjo menindak ratusan pelanggar melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Handheld. Penindakan dilakukan secara mobile di sejumlah titik rawan pelanggaran dan kecelakaan di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Suryanto, Wartawan Radar Sidoarjo

BERDASARKAN hasil operasi, tercatat total 473 pelanggaran lalu lintas. Rinciannya meliputi ETLE Mobile sebanyak 61 pelanggaran, ETLE statis di Krian 164 pelanggaran, ETLE statis di Kletek 28 pelanggaran, serta ETLE Handheld sebanyak 220 pelanggaran.

Kasatlantas AKP Yudhi Anugrah Putra menjelaskan bahwa penggunaan

● Ke Halaman 10



DITILANG: Personel Satlantas Polresta Sidoarjo menindak pelanggar lalu lintas menggunakan sistem ETLE Handheld di Sidoarjo



ETLE Handheld Jaring...

ETLE Handheld merupakan inovasi penegakan hukum berbasis teknologi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Sistem ini memungkinkan setiap pelanggaran terekam secara elektronik, sehingga meminimalkan interaksi langsung antara petugas dan pelanggar.

Penindakan ini juga sebagai upaya edukasi untuk membangun budaya tertib berlalu lintas secara berkelanjutan. Kami berharap masyarakat semakin disiplin demi keselamatan bersama," ujarnya.

Ia menambahkan, Satlantas Polresta Sidoarjo akan terus mengoptimalkan penegakan hukum berbasis teknologi guna menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

"Langkah ini sekaligus untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Polri," imbuhnya.

Sementara itu, salah satu pelanggar, Budi Santoso, 35, mengaku menerima sanksi yang diberikan dan berjanji akan lebih tertib saat berkendara.

"Saya mengakui kesalahan dan menerima penindakan ini. Ini menjadi pelajaran agar ke depan lebih patuh terhadap aturan lalu lintas," ungkapnya. (sur/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



DPRD Sidoarjo Dorong Penguatan UMKM di Tengah Tantangan Ekonomi Digital

SIDOARJO-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo mendorong penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu bertahan sekaligus berkembang di tengah derasnya arus ekonomi digital. Transformasi digital dinilai menjadi kunci penting, namun tetap perlu diimbangi dengan dukungan kebijakan dan pendampingan yang konkret.



Abdillah Nasih, SM
Ketua DPRD Sidoarjo

Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, mengatakan UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah yang harus mendapat perhatian serius, terutama dalam menghadapi perubahan pola bisnis berbasis digital.

"UMKM kita memiliki potensi besar. Namun di era digital ini, mereka juga menghadapi tantangan baru, mulai dari pemasaran online, persaingan dengan produk luar, hingga adaptasi teknologi. Ini yang harus kita bantu," ujarnya.

Menurutnya, DPRD Sidoarjo berkomitmen mendorong kebijakan yang berpihak pada pelaku UMKM, mulai dari kemudahan akses permodalan, pelatihan digitalisasi, hingga perlindungan terhadap produk lokal.

Ia menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam memperkuat daya saing UMKM. Tanpa kolaborasi yang baik, upaya pengembangan UMKM akan berjalan tidak maksimal.

"Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Harus ada kolaborasi

antara pemerintah, DPRD, dan pelaku UMKM itu sendiri agar mampu naik kelas," tambahnya.

Di sisi lain, tantangan ekonomi digital juga membawa risiko tersendiri, seperti persaingan harga yang semakin ketat dan maraknya produk impor dengan harga lebih murah.

Oleh karena itu, perlindungan terhadap produk lokal menjadi hal yang tidak kalah penting.

"Produk lokal harus kita lindungi. Jangan sampai UMKM kita kalah di pasar sendiri," tegas Abdillah Nasih.

Dengan berbagai langkah tersebut, DPRD Sidoarjo berharap UMKM tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang dan menjadi motor penggerak ekonomi daerah di tengah era digital yang terus berkembang.

"Kami ingin UMKM Sidoarjo naik kelas, berdaya saing, dan



PROMOSI: Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diharapkan mampu bertahan sekaligus berkembang di tengah derasnya arus ekonomi digital.

mampu menjadi kekuatan ekonomi utama daerah," jelasnya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Warih Andono, menyoroti pentingnya literasi pemasaran bagi pelaku UMKM. Ia menyebut masih banyak pelaku usaha kecil yang belum sepenuhnya memahami pemanfaatan platform digital untuk pemasaran maupun pengembangan usaha.

"Digitalisasi itu bukan sekadar masuk marketplace. Pelaku UMKM juga harus paham strategi pemasaran digital, manajemen keuangan berbasis

teknologi, hingga branding produk," jelasnya.

Warih menilai, pemerintah daerah perlu memperbanyak program pelatihan yang aplikatif dan berkelanjutan. Pelatihan tersebut tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memberikan pendampingan langsung hingga pelaku UMKM benar-benar mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh.

"Jangan hanya pelatihan satu-dua hari lalu selesai. Harus ada pendampingan berkelanjutan supaya hasilnya nyata," tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya infrastruktur digital yang merata. Akses internet yang stabil dan terjangkau dinilai menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan transformasi digital UMKM.

"Kalau kita bicara digitalisasi, maka infrastruktur juga harus siap. Jangan sampai UMKM di desa tertinggal karena keterbatasan akses internet," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Bambang Pujiyanto, menekankan perlunya penguatan dari sisi produksi dan kualitas produk UMKM.

Menurutnya, digitalisasi akan sia-sia jika tidak diimbangi dengan kualitas produk yang mampu bersaing.

"Produk UMKM harus punya standar kualitas yang baik. Mulai dari kemasan, rasa, hingga legalitas seperti izin edar dan sertifikasi halal. Ini penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen," katanya.

Bambang juga mendorong agar pemerintah daerah memberikan fasilitasi terkait perizinan usaha, termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi lainnya yang sering menjadi kendala bagi pelaku UMKM.

"Banyak pelaku UMKM yang terkendala di perizinan karena prosesnya dianggap rumit. Ini harus dipermudah agar mereka bisa berkembang lebih cepat," ujarnya.

Selain itu, ia melihat peluang besar bagi UMKM Sidoarjo untuk menembus pasar ekspor jika didukung dengan strategi yang tepat. Produk-produk unggulan seperti makanan olahan, kerajinan, hingga fashion dinilai memiliki potensi besar di pasar internasional.

"Kalau didampingi dengan baik, UMKM kita bisa menembus pasar ekspor. Ini yang harus kita dorong bersama," tambahnya.

DPRD Sidoarjo juga mendorong optimalisasi peran koperasi sebagai wadah penguatan UMKM, baik dalam hal pembiayaan maupun pemasaran. Koperasi dinilai dapat menjadi jembatan antara pelaku UMKM dengan pasar yang lebih luas. (vga)



Jika menilik rekam jejak pembangunan sejak Tahun 2021, Frontage Road sejatinya sempat menunjukkan geliat positif. Puncaknya, terjadi pada Tahun 2022, di mana pembangunan mampu menyentuh angka 3.003,9 meter. Namun, setelah sempat fluktuatif di Tahun 2023 (1.093 meter) dan di Tahun 2024 (2.391 meter). Sedangkan capaian di Tahun 2025 justru anjlok drastis hingga menyentuh angka hampir nol.

Rekam Jejak Pembangunan Frontage Road (2021-2025):

Tahun	Capaian (Meter)
2021	1.290
2022	3.003,9
2023	1.093
2024	2.391
2025	10
Total	7.778,9





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Melihat kondisi yang memprihatinkan itu, Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Choirul Hidayat langsung melayangkan kritik tajam. Menurutnya, kegagalan realisasi target ini adalah sinyal ada mekanisme kerja yang macet di Lubuh Dinas PUBM dan SDA Pemkab Sidoarjo.

"Kalau melihat tren sebelumnya, capaian bisa ribuan meter per tahun. Tapi di 2025 hanya 10 meter. Ini jelas ada yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam kinerjanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menanganinya," ujar politisi senior PDI Perjuangan yang akrab disapa Abah Dayal dengan nada geram, Selasa (28/04/2026).



Lebih jauh, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sidoarjo ini menuntut transparansi penuh dari dinas terkait. Ia mendesak agar kendala di balik mandeknya proyek (FR) ini bisa segera dibedah. Apakah persoalan klasik pembebasan lahan, perencanaan yang tidak matang atau justru karena hambatan teknis lainnya.

"Harus dibuka apa saja masalahnya. Jangan sampai target hanya jadi angka di atas kertas saja. Sementara masyarakat terus dirugikan kemacetan yang kian menjadi-jadi di wilayah Buduran, Gedangan hingga Waru," ungkapnya.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Frontage road sejatinya diproyeksikan sebagai nadi baru lalu lintas Sidoarjo yang kini semakin padat. Kelidakeriusan Pemkab Sidoarjo dalam penyelesaian proyek ini, dikawatirkan akan memicu kemacetan permanen yang merugikan warga.

"Kami (Komisi C DPRD Sidoarjo) bakal terus mengawal ketat kinerja OPD terkait agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Harapannya, perencanaan ke depan tidak hanya mengejar target Linggi di atas kertas saja. Akan tetapi harus realistis, terukur dan benar-benar berdampak bagi masyarakat Sidoarjo," tegasnya.

Kini, bola panas ada di tangan Dinas PUBM dan SDA Pemkab Sidoarjo. Publik menanti langkah konkret dari pemerintah daerah, apakah ini akhir dari mimpi kemudahan akses jalan atau justru hanya batu sandungan yang akan segera dibenahi proses dan langkahnya.
Ary/Waw

Editor : Redaksi



Parkir Dianggap Lahan Bisnis, JCW Wadul DPRD Sidoarjo Protes Tarif Progresif RSUD RT Notopuro Bebani Pengunjung

Republikjatim.Com
Selasa, 29 Apr 2026 13:45 WIB



Sidoarjo (republikjatim.com) - Kebijakan tarif parkir progresif di RSUD RT Notopuro Sidoarjo menuai gelombang protes keras. Hal ini, karena tarif progresif itu, dinilai membebani masyarakat yang lengah tertimpa musibah. Terutama bagi keluarga pasien yang menjalani perawatan di RSUD milik Pemkab Sidoarjo itu.

Karena itu, Ketua Umum Jawa Corruption Watch (JCW), Sigit Imam Basuki secara resmi melayangkan laporan ke Kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo, Jumat (24/04/2026) kemarin. Langkah tegas ini, diambil menyusul banyaknya keluhan dari keluarga pasien yang merasa "tercekik" dengan skema tarif yang diterapkan di lingkungan rumah sakit milik Pemkab Sidoarjo itu.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan menyebutkan, sistem parkir di RSUD RT Notopuro Sidoarjo menerapkan kenaikan tarif hingga 100 persen setiap durasi 4 jam. Rincian tarif yang saat ini berlaku adalah:

*Sepeda Motor: Rp 3.000 / 4 jam

*Mobil: Rp 5.000 / 4 jam

*Bus/Box/Truck: Rp 6.000 / 4 jam

Sigil Imam Basuki mengatakan nilai nominal itu sangat tidak manusiawi. Alasannya, mengingat RSUD Sidoarjo adalah fasilitas pelayanan publik, bukan ruang untuk mencari keuntungan komersial (lahan bisnis).

"Kenaikan tarif sebesar 100 persen setiap 4 jam ini sangat meresahkan. Rumah sakit itu melayani masyarakat yang lagi susah. Parkir kok dijadikan bisnis! Jangan mencari keuntungan besar di atas penderitaan (keluarga pasien) masyarakat Sidoarjo," ujar Sigil Imam Basuki, Selasa (28/04/2026).



Menurut Sigil, penerapan tarif progresif ini menjadi preseden buruk bagi citra pelayanan kesehatan di wilayah Sidoarjo. Ia menilai adanya indikasi pengelola parkir lebih mengedepankan profit (keuntungan) dibandingkan fungsi sosial rumah sakit dalam membantu warga yang sedang menjenguk atau menunggu kerabat yang dirawat di rumah sakit itu.

"Kami (JCW) mendesak pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo untuk tidak tinggal diam melihat keluhan masyarakat Sidoarjo ini," pinta Sigil yang dikenal aktif mengkritisi kinerja Pemkab Sidoarjo ini.



Dalam surat yang dilayangkan ke DPRD Sidoarjo, lanjut Sigil terdapat beberapa poin tuntutan yang diajukan. Diantaranya Inspeksi Mendadak (Sidak). Yakni meminta pimpinan dan anggota dewan (DPRD Sidoarjo) segera turun ke lapangan untuk mengecek fakta di lapangan dan mendengarkan langsung keluhan warga di lokasi.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Selain itu harus ada evaluasi regulasi. Yakni melakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah (Perda) Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2025. Jika regulasi itu terbukti merugikan masyarakat, JCW mendesak agar segera direvisi.

Kejadian harus ada transparansi pengelolaan. Yakni memastikan pengelola parkir tidak melakukan praktik bisnis yang membebani masyarakat di ruang fasilitas publik.

"Kami meminta DPRD Sidoarjo segera menindaklanjuti laporan kami. Jangan sampai regulasi yang ada justru menjadi alat untuk membebani warga yang sudah susah karena sedang berurusan dengan kesehatan," Landas Sigil.

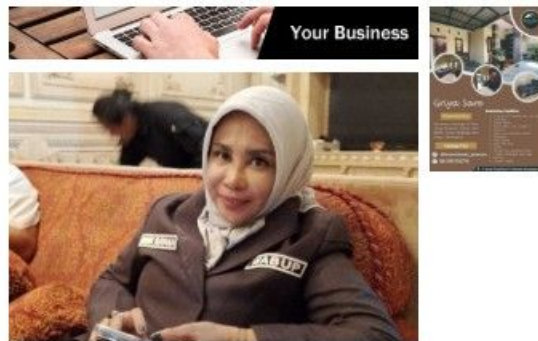
Sementara hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak manajemen RSUD RT Noloपुरo maupun pihak Lerkail mengenai kebijakan tarif parkir yang sedang menjadi sorotan publik ini. Begitu pula dari pihak ketiga sebagai pemenang tender pengelolaan Parkir RSUD RT Noloपुरo Sidoarjo. Hel/Waw

Editor : Redaksi



Langkah Cerdas Wabup Mimik Idayana, Sekali Gerak Gaet 60 Miliar Dana Perbaikan Untuk Ribuan Sekolah

diterbitkan | 28 April 2026, 12:52 pm | 0 comments | 74 views



Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo Hj Mimik Idayana SAP.

DIMENSINEWS.COM SIDOARJO: Untuk kesekian kalinya, Wakil Bupati Hj. Mimik Idayana S. A.P melakukan terobosan cerdas ke pemerintah pusat. Tak tanggung-tanggung, upaya terobosan yang dilakukan orang nomor dua Sidoarjo itu terbukti sangat manis, dimana melalui lobi-lobi politik akhirnya pihak pemerintah pusat tahun ini dipastikan bakal mengucurkan kembali dana Rp 60 miliar yang kesemuanya anggaran tersebut dialokasikan untuk perbaikan sedikitnya 1.100 sekolah SDN dan SMPN yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo. Kepsastian kucuran dana pusat menopang peningkatan pembangunan infrastruktur pendidikan ini diungkapkan Wabup Mimik saat dikonfirmasi fenomena kondisi bangunan sekolah banyak yang rusak, bahkan mengancam keselamatan siswa. "Ya, memang memprihatinkan, di Sidoarjo ternyata masih banyak bangunan sekolah yang rusak dan perlu percepatan perbaikan. Dan alhamdulillah, pemerintah pusat mendengar permasalahan ini," katanya, pada Selasa (28/4/2026) siang.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Sidoarjo bahwa saat ini sebanyak 1.100 sekolah, -mulai SDN hingga SMPN yang rusak, bahkan bisa mengancam keselamatan siswa dan para guru. Untuk percepatan perbaikan agar ketangguhan pendidikan nyaman dan aman, tentunya tidak bisa mengandalkan kekuatan dana APBD semata.

Sehingga salah satu langkah strategis dilakukan Mak Mimik, sapaan Wabup yang juga menjabat ketua DPC Partai Gerindra Sidoarjo ini adalah melakukan lobi-lobi ke kementerian terkait. Alhasil, upayanya tidak sia-sia, -untuk perbaikan bangunan sekolah itu pihak pemerintah pusat pada anggaran tahun ini telah mengucurkan dana Rp 60 miliar. "Semula hanya diberi Rp 50 miliar, dan saya minta tambahan karena begitu banyaknya bangunan sekolah yang perlu direnovasi. Akhirnya ditambah Rp 10 miliar, sehingga menjadi Rp 60 miliar," ujarnya.

Dengan kucuran dana pusat ini, pihaknya berharap perbaikan bangunan sekolah bisa segera dilakukan karena dinilai begitu urgen untuk kenyamanan dan keselamatan kelangguhan kegiatan belajar siswa. Dalam perbaikan bangunan sekolah ini juga diharapkan berjalan baik dan berkualitas.

"Saat pagi berapa besar anggaran untuk perbaikan masing-masing sekolah tentunya berbeda. Disesuaikan dengan tingkat kerusakan bangunan yang perlu diperbaiki berdasarkan proposal diajukan pihak sekolah," katanya.

"Saya sendiri yang akan mengawasi langsung di lapangan," tambah Mak Mimik. Keberhasilan Wabup Mimik meraih dana pusat untuk percepatan pembangunan di Sidoarjo pada tahun ini, tentunya bukan kali pertama. Dia dikenal bekerja tanpa pamrih, dan juga tidak butuh pencitraan, namun hasilnya nyata yang bermuara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo.

Sebelumnya, lobi-lobinya juga menghasilkan anggaran pusat sebesar Rp 84 miliar untuk kelanjutan betonisasi jalan lingkar timur Sidoarjo. Selain itu, untuk menopang program renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) Sidoarjo, Wabup Mimik berhasil mendapatkan suntikan dana pusat Rp 36 miliar untuk perbaikan 1.200 rumah warga. (Dil)



Tarif Parkir Progresif Disorot Bermotif Bisnis, RSUD RT Notopuro Berikan Klarifikasi

28 April 2026 11:51 WIB
oleh redaksi



Kasubag Humas RSUD RT Notopuro, Rizqi Maulana Hadi Berikan Klarifikasi Tarif parkir progresif

Sidoarjo, **petisi.co** – Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Tumenggung (RT) Notopuro akhirnya buka suara terkait tarif parkir progresif yang dinilai memberatkan keluarga pasien.

Kasubag Humas RSUD RT Notopuro, Rizqi Maulana Hadi memastikan tarif parkir progresif tempat khusus tersebut sudah dijalankan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tahun 2025.



Keterangan tarif parkir rawat inap RSUD RT Notopuro tertera pada papan informasi pintu masuk dan keluar kendaraan

"Sesuai dengan Perda Nomor 4 tahun 2025, berlaku tarif parkir tempat atau lokasi khusus. Untuk motor/R2 Rp 3.000 dan Rp 5.000 mobil/R4. RSUD sebagai bagian dari penyesuaian regulasi retribusi parkir diterapkan tarif progresif, kelipatan hingga 100% setiap 4 jam," terang Rizqi Maulana Hadi, Senin (27/4/2026).

Rizqi juga meluruskan sorotan publik yang menduga adanya motif kepentingan bisnis dibalik penerapan tarif parkir progresif. Ia menegaskan RSUD merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau rumah sakit milik pemerintah. Sehingga pengelolaan parkir sepenuhnya dijalankan pihak swasta yakni Fabian Duta Rama (FDR).

"Kami klarifikasi dugaan terkait aspek bisnis di belakang penerapan tarif progresif itu tidak benar. Sebab kami ini, rumah sakit pemerintah, fokus pada pelayanan pasien dan hanya menjalankan Perda regulasi parkir. Untuk pengelolaan parkir diserahkan sepenuhnya ke pihak ketiga," tekannya.

Rizqi menjamin kendaraan keluarga pasien yang menjalani rawat inap, bisa mendapatkan tarif parkir khusus. Ketentuan itu berlaku per 3 hari parkir, untuk motor dikenakan Rp 20.000 dan mobil Rp 30.000.

"Tarif parkir khusus bagi kendaraan pasien yang menjalani rawat ada kok. Tulisan ketentuan itu bisa dilihat di bagian bawah papan parkir di pintu masuk maupun pintu keluar," ucapnya seraya menunjuk papan informasi tarif parkir yang dimaksud.

Keluarga pasien bisa mendapatkan tarif parkir khusus rawat inap dengan mengisi formulir yang telah disediakan di meja petugas pendaftaran. Selain itu, informasi parkir dengan tarif khusus juga bisa ditanyakan pada penjaga pintu masuk.

"Keluarga pasien tidak perlu ragu dan bingung. Jika memang mau rawat inap, petugas pendaftaran akan mengarahkan untuk mengisi form parkir tarif khusus. Namun kalau lupa dan sudah terlanjur masuk kamar perawatan, maka bagian pelayanan tenaga kesehatan pasti akan mengingatkan dan menanyakan hal itu," bebarnya.

Demikian pula, bagi keluarga pasien rawat jalan yang tengah berobat dengan estimasi waktu lebih dari 4 jam, pihak rumah sakit akan memberikan kelonggaran tarif. Seperti pasien yang akan menjalani cuci darah atau Hemodialisis (HD).

"Contoh pasien HD, kita cek ke perawat dibilang 5 jam. Lalu pasien ditanya lamanya waktu cuci darah dijawab 4 jam. Sedangkan dokternya ngomong butuh waktu 6 jam. Maka yang seperti ini, kita beri kelonggaran tarif parkir ikut yang 4 jam," ujarnya.

Rizqi menyebut ketentuan parkir tarif khusus untuk masing-masing pasien rawat inap hanya diberikan kepada satu kendaraan saja. Selebihnya, kendaraan kedua jika menginap di parkir dikenakan tarif progresif.

"Hanya berlaku untuk satu kendaraan saja. Terserah keluarga pasien yang mau didaftarkan tarif khusus itu yang mana? apakah motor atau mobil. Tidak boleh mendaftarkan dua kendaraan. Hanya dibatasi satu saja," tutupnya memberi penekanan. (luk)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Makin Mengeras Viral Tarif Parkir RSUD Notopuro Dikeluhkan Publik Sidoarjo, Ini Penjelasan

Sidasa, 28 April 2026 | 09:31 WIB



Tarif parkir RSUD Notopuro Sidoarjo menuai sorotan publik, terkait dasar hukum progresif dan kesesuaian Perda 2025. (Din)



Ruang Nurudin



Print PDF

Sidoarjo, Ruang.co.id – Keluarga pasien RSUD RT Notopuro, Dirga Anabil, warga Sidoarjo, mengeluhkan tarif retribusi parkir progresif di area rumah sakit, mencakup motor, mobil, dan kendaraan besar, bagi pengunjung layanan kesehatan, yang berlangsung penerapan sejak 2025, berujung sorotan hingga April 2026.

Dirga, satu dari sejumlah keluarga pasien RSUD Notopuro, sedikitnya 10 orang yang mengirim pesan singkat melalui WhatsApp (WA) jurnalis Ruang.co.id, yang mengeluh dengan tarif retribusi parkir, yang kini cukup viral diunggah di media sosial (medsos).

Pengunjung ini menyampaikan keluhan tarif rumah sakit tersebut, makin meningkat kepada pengelola, mencakup biaya dasar dan progresif. Penerapan tarif inilah yang memberatkan bagi keluarga pasien, terutama pendamping lama, mencapai kenaikan dua kali lipat.

Di lokasi areal parkir rumah sakit, papan tarif menampilkan angka resmi kepada pengguna, mencakup motor Rp3.000 mobil Rp5.000 kendaraan besar Rp6.000, bagi seluruh pengunjung, dalam durasi empat jam, meningkat seratus persen, diterapkan sistem progresif, di pintu masuk area parkir, sejak diberlakukan.

"Sebab kasihan bagi saudara atau orang tuanya yang sakit dirawat Inap, dengan biaya tarif parkir seperti itu, kan riwa riwi masuk RS untuk jaga Pasien dan lain – lain, sangat membebani mereka, apalagi bagi masyarakat ekonomi ke bawah," keluh kesah Dirga kepada Ruang.co.id pada Senin (37/4/2026).

"Kami berharap pemerintah kabupaten memperhatikan keluhan ini, untuk segera menurunkan pemberlakuan tarifnya, dan warga yang lain juga mengeluh sama sampai viral di TikTok," imbuh keluhnya.

Banyak dibaca

- 1 Dugaan Gelar Akademik Palsu pengacara kondang Robert Simangunsong Jadi Terdakwa Di PN Surabaya
- 2 Drama Korea "Family Plan" Kisah Keluarga Super yang Menyamar
- 3 Air Supply dan Rick Price Bakal Konser di Indonesia Bersama MLTR! Cek Line Up dan Harga Tiketnya
- 4 Gaji UMR Sidoarjo 2025 Resmi Naik, Posisi Ketiga Tertinggi di Jawa Timur
- 5 Lirik Lagu Mariah Carey "Thank God I Found You" Lengkap dengan Terjemahan



Hai senada juga dialami MR, warga di lingkungan Kecamatan Buduran, Sidoarjo. Dia parkir menginap di RSUD tersebut selama tiga hari, dikenakan tarif Rp 20.000. Sekalipun dengan perasaan dongkolnya dipendam, dia pun membayar tarif supaya bisa keluar dari areal parkir rumah sakit.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

"Ya mau gimana lagi, saya bayar. Soal kemahalan atau tidak, kami berharap dengan pemberitaan yang mengedepankan obyektivitas, dapat memberikan solusi yang terbaik bagi semua pihak," harap MR kepada Ruang.co.id pada Senin (27/4/2026).

Regulasi daerah, menetapkan dasar hukum kepada pemerintah, mencakup Perda Nomor 4 Tahun 2025, bagi pengelolaan pajak dan retribusi, sebagai turunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, berjalan menyesuaikan kebijakan nasional, di Kabupaten Sidoarjo, sejak disahkan.

Penggalian keluhan kesah keluarga pasien menyampaikan pengalamannya tersebut, mencakup beban biaya parkir, bagi kondisi darurat, selama menunggu perawatan, meningkat seiring waktu, berujung keberatan langsung, di area parkir RSUD Notopuro, saat kunjungan berlangsung.

"Ini bukan tempat rekreasi. Kami datang karena kondisi darurat, tapi biaya parkir terasa bertambah seiring waktu," ujar seorang keluarga pasien saat keluar dari gerbang lokasi parkir, menegaskan dampak langsung kebijakan tarif progresif, pada situasi layanan kesehatan mendesak.

Pengelolaan parkir dijelaskan sebagai sistem kepada publik, mencakup kemungkinan kerja sama pihak ketiga, bagi optimalisasi layanan, menghasilkan pendapatan daerah atau PAD, berjalan melalui skema kemitraan, di sektor layanan publik, dalam praktik umum pemerintah daerah.

Rizki Maulana Hadi, Kepala Subbagian Humas RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo, menanggapi segala keluhan pengunjung rumah sakit. Kepada Ruang.co.id menjelaskan bahwa, penerapan tarif parkir progresif di lingkungan rumah sakitnya, merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025.

Dia menyebut bahwa mayoritas pasien RSUD Notopuro adalah pengguna BPJS, yang mencapai sekitar 90 persen. Hal ini menjadi pertimbangan tersendiri dalam menjaga keseimbangan antara pelayanan publik dan pengelolaan fasilitas secara mandiri sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

"Tetapi kami tetap mengacu pada Perda nomor 4 tahun 2025. Semua terkait tarif yang kami terapkan ada pada Perda itu. Meski demikian, kami berterima kasih atas kritik dan masukannya dari warga pengunjung rumah sakit, untuk menjadi pertimbangan selanjutnya," terang Rizki pada Senin (27/4/2026).

Meski demikian, Rizki mengakui masih terdapat kendala dalam aspek sosialisasi kebijakan, terutama terkait informasi tarif khusus bagi keluarga pasien. Pihak rumah sakit berkomitmen untuk meningkatkan penyebaran informasi agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Meski demikian, Rizki mengakui masih terdapat kendala dalam aspek sosialisasi kebijakan, terutama terkait informasi tarif khusus bagi keluarga pasien. Pihak rumah sakit berkomitmen untuk meningkatkan penyebaran informasi agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat.

Ia menegaskan, kebijakan ini berada dalam posisi dilematis, antara tuntutan regulasi dan kebutuhan pelayanan. "Kami hanya menjalankan aturan yang ada," ujarnya.

"Memang untuk penanganan parkir RS UD Notopuro kami kelola secara mandiri, tidak masuk Dishub, tapi kami kerjasamakan dengan pihak ketiga," terangnya lagi.

Selain itu, kebijakan ini, menurutnya, tidak berdiri sendiri sebagai upaya profesionalisme pelayanan publik, melainkan lahir dari kebutuhan penataan area parkir yang selama ini kerap disalahgunakan.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, sekitar 30 persen kendaraan yang parkir di area rumah sakit, bukan berasal dari pasien atau keluarga pasien, melainkan kendaraan yang ditinggalkan sehari-hari.

Kondisi tersebut berdampak pada keterbatasan lahan parkir, terutama saat lonjakan kunjungan seperti hari raya, sehingga mengganggu kenyamanan pasien yang membutuhkan akses layanan kesehatan.

Dalam praktiknya, tarif dasar parkir tetap mengacu pada perda, yakni sekitar Rp3.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil. Skema progresif diterapkan sebagai instrumen pengendalian durasi parkir.

Namun, Rizki menegaskan bahwa terdapat perlakuan khusus bagi keluarga pasien rawat inap. Mereka dapat memperoleh tarif khusus, melalui mekanisme pendataan menggunakan formulir resmi rumah sakit, dengan ketentuan satu kendaraan per pasien, baik roda dua maupun roda empat.

"Bagi setiap keluarga pasien yang rawat inap, bisa meminta form tarif khusus ke bagian loket parkir atau ke ruang security di bagian depan areal parkir. Atas masukannya, kami akan perjelas tambahan informasi penerapan tarif khusus untuk keluarga pasien yang rawat inap, pada papan pengumuman tarif retribusi parkir di beberapa titik yang sudah ada," pungkas Rizki.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Terkait penerapan tarif retribusi parkir secara progresif di titik – titik pelayanan publik milik pemerintah, memang tidak sedikit yang mengeluhkannya dengan istilah umum

"Biaya parkir mahal dan terkesan mementingkan aspek bisnisnya semata", sekalipun dengan alih – Alih dari pihak pemerintah untuk mendongkrak Pendapatan Asli Delaerah (PAD)-nya.

Hal demikian, kata MR warga yang mengeluh, dapat menjadi pertimbangan parlemen sebagai wakil rakyat dan pengawas kebijakan publik, untuk dilakukan pengkajian.

Sekalipun dalam Perda No. 4 tahun 2025 tersebut menerangkan retribusi progresif dapat diberlakukan di tempat pelayanan kesehatan dan pusat perbelanjaan.

Harapannya, para dewan pengawas kebijakan publik, dapat memberikan masukan atas kepatutan dan kepatantasan di tempat layanan kesehatan masyarakat, perlu dan tidaknya diterapkan tarif progresif.

